

BAHASA SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA DALAM POSTKOLONIAL MASYARAKAT INDONESIA

Desi Karolina Saragih, S. Pd., M. Pd

Universitas Pamulang
dosen01414@unpam.ac.id

ABSTRAK

Bahasa secara umum dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi.

Begitu juga dengan budaya tidak terlepas dari bahasa yang kita gunakan dalam masyarakat Indonesia karena budaya merupakan identitas dalam postkolonial dalam masyarakat Indonesia. Bahasa merupakan sebuah sistem, yang artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Definisi sederhana postkolonial adalah sebagai masa setelah kolonialisme. Tetapi pengertian postkolonial itu dapat ditinjau dari sisi lain daripada sekedar tahapan periode sejarah atau dari segi waktu, yaitu dari sisi orientasi ideologis. Jadi bahasa berkaitan erat dengan identitas budaya postkolonial masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Bahasa, Budaya, Postkolonial, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Untuk dapat meraih kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Pertama, bahwa bahasa Melayu merupakan *lingua franca* (bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial diantara orang-orang yang berlainan bahasanya) di Indonesia.

Jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia, bahasa Melayu sudah terlebih menjadi alat komunikasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti pada zaman kerajaan Sriwijaya (kisaran abad VII) yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu seperti prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat yang berangka tahun 686, dan prasasti Karang Brahi yang berangka tahun 686.

Selain itu, keberadaan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Indonesia juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang disusun oleh seorang Portugis bernama Pigafetta pada tahun 1522. Daftar tersebut dia susun berdasarkan kata-kata dari bahasa Melayu yang ada dan tersebar penggunaannya di kepulauan Maluku, juga pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Surat keputusan yang bernomor

K.B.1871 No.104 menyatakan bahwa pengajaran di sekolah-sekolah bumi putera diberikan dalam bahasa daerah, kalau tidak, dipakai bahasa Melayu.

Alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan. Tidak seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkatan seperti krama, krama madya, dan ngoko, bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan seperti itu. Bahasa Melayu yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan dalam sistem berbahasa ini menciptakan kesan bahwa bahasa Melayu mudah dipelajari.

Selain itu, diterima dan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia disebabkan kerelaan berbagai suku di Indonesia. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam ragam penuturnya, mau tidak mau, takluk pada hukum perubahan. Arah perubahan itu tidak selalu tidak terelakan karena kita pun dapat mengubah bahasa secara berencana. Faktor sejarah dan perkembangan masyarakat turut pula berpengaruh masyarakat turut pula berpengaruh pada timbulnya sejumlah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut “bahasa Indonesia” karena masing-masing berbagi teras atau inti sari bersama yang umum. Ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, dan tata makna umumnya sama. Itulah sebabnya, kita masih dapat memahami orang lain yang berbahasa Indonesia, walaupun disamping itu kita dapat mengenali beberapa perbedaan dalam perwujudan bahasa Indonesiannya (Moeliono, 1988a).

Istilah ragam dapat disejajarkan dengan variasi. Seperti halnya jika orang mengatakan bahwa modelnya sangat beragam, didalamnya terkandung maksud bahwa modelnya sangat bervariasi. Adanya ragam atau variasi mengimplikasikan bahwa dari berbagai ragam atau variasi itu terdapat satu model yang menjadi acuannya. Dengan demikian, bagaimanapun model variasinya pastilah terdapat intisari atau ciri-ciri umum yang sama. Jika variasi itu sudah menyimpan jauh dari inti yang menjadi acuannya, itu berarti bahwa sudah bukan menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya sebagai pegangan hidup.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan sebagai lambang identitas nasional berhubungan erat dengan fungsinya yang ketiga, yaitu sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa harus meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial dan budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan; malahan lebih dari pada itu.

Latar belakang sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda itu pula menghambat adanya hubungan antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa nasional, penduduk dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Sebagai bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36. Sebagaimana diketahui, pasal 36 itu selengkapnya berbunyi, “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”. Landasan konstitusional ini memberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai urusan kenegaraan dan dalam menjalankan tata pemerintahan.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengaruh di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan perkembangan akan berberbagai macam fungsi bahasa sesuai dengan situasinya. Situasi tempat, pembicara/penulis, pendengar/pembaca, pokok pembicaraan, dan sebagainya menentukan ragam bahasa yang dipilih seseorang dalam komunikasinya.

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang dimaksud bahasa?
- b. Apa yang dimaksud identitas kebudayaan?
- c. Apa saja postkolonial?

2. Tujuan

Secara lebih khusus, dengan materi Ragam Bahasa Indonesia di Tinjau dari Ragam Pendidikan disekolah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan pengertian bahasa.
- b. Menjelaskan identitas kebudayaan.
- c. Menjelaskan postkolonial

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bahasa

Di dalam masyarakat, kata bahasa sering dipergunakan dalam berbagai konteks dengan berbagai macam makna. Ada orang yang berbicara tentang "bahasa warna", "tentang"bahasa bunga", tentang "bahasa diplomasi", tentang"bahasa militer", dan sebagainya. Di Smping itu dalam kalangan terbatas terutama dalam kalangan orang yang membahas soal-soal bahasa, ada yang berbicara tentang"bahasa Tulisan", "bahasa lisan", "bahasa tutur", dan sebagainya.

Untuk pemakaian pertama tersebut tidak akan ada komentar apa-apa disini. Maklumlah, sudah lazim kata-kata yang sebenarnya mempunyai makna tertentu dalam suatu bidang dipakai secara luas oleh masyarakat umum, sehingga maknanya menjadi kabur. Contoh lain kita dapat dalam pemakaian kata-kata seperti *emas*, *flim*, *logis*, *wacana*, *penyakit*, *harga diri kurang*, dan sebagainya, yang dalam bidang ilmu yang memakainya mempunyai makna tetap dan tertentu, tetapi telah dipakai oleh orang awam, yakni orang yang tidak bergerak dalam bidang ilmu yang bersangkutan, secara begitu saja sesuai dengan keperluan. Pemakaian kedua akan disinggung dalam bab tentang bahasa alam kebudayaan dan masyarakat, karena walaupun ada kebenaran dibelakangnya, namun dilihat dari sudut sistematik linguistik kata atau istilah bahasa disitu tidak dipergunakan dengan pengertian yang tajam.

Bagi linguistik-ilmu yang khusus mempelajari bahasa-yang dimaksud dengan bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Definisi tersebut perlu dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul *secara* beraturan. Seperti halnya sistem-sistem, artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur-unsur bahasa" diatur" seperti pola-pola yang berulang

sehingga kalau hanya salah satu bagian saja tidak tampak, dapatlah "diramalkan" keseluruhan ujaranya. Misalnya, bila kita menemukan bentuk seperti ini

berangkat.... kantor

Ibu tinggal...rumah,

Dengan segera dapat kita duga bagaimana bunyi kalimat itu keseluruhan. Sifat itu dapat dijabarkan lebih jauh dengan mengatakan bahwa bahasa itu sistematis, artinya bahasa itu dapat diuraikan atau satu-satuan terbatas yang terkombinasi dengan kaidah-kaidah yang diramalkan; disamping itu, bahasa juga sistematis, artinya bahasa itu bukanlah sistem yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem gramatika, subsistem leksikon-konsep-konsep ini akan dijelaskan dibawah ini.

Kedua, bahasa adalah sebuah sistem tanda. Tanda adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu, atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi (melihat, mendengar, dan sebagainya) apa yang diwakilkannya itu'. Setiap bagian dan sistem itu atau setiap bagian dari bahasa tentulah mewakili sesuatu. Tegasnya, bahasa itu bermakna, artinya bahasa itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan alam sekitar masyarakat yang memakainya.

Ketiga, bahasa adalah sistem bunyi. Pada dasarnya bahasa itu berupa bunyi. Apa yang kita kenal sebagai tulisan sifatnya sekunder, karena manusia dapat berbahasa tanpa mengenal tulisan. Beberapa jenis huruf bahkan tidak lain dari pada turunan belaka dari bunyi.

Keempat, supaya orang dapat bekerja sama dalam berkomunikasi, bahasa digunakan berdasarkan kesepakatan. Artinya, sesuatu diberi makna di dalam bahasa tertentu karena demikianlah kesepakatan pemakai bahasa itu. Para pengguna baru tinggal mempelajarinya.

Kelima, bahasa bersifat produktif, artinya sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas bahasa dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Bahasa Indonesia, misalnya, mempunyai fonem kurang dari 30, tetapi mempunyai kata lebih dari 80.000 yang mengandung fonem-fonem itu. Dengan fonem-fonem itu masih mungkin diciptakan kata-kata baru. Dari sudut peraturan, bahasa Indonesia hanya mempunyai 5 tipe kalimat, yakni pernyataan, perintah, keinginan, dan seruan, tetapi dengan kelima tipe itu kita dapat menyusun kalimat Indonesia yang jumlahnya ribuan, bahkan jutaan.

Keenam, bahasa bersifat unik. Artinya, tiap bahasa mempunyai sistem yang khas yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Bahasa Jawa mempunyai sekitar 100 kata untuk menyebutkan anak berbagai bintang yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Inggris mempunyai lebih dari 50 kata untuk menggambarkan berbagai bentuk daun yang tidak dikenal dalam bahasa lain.

Ketujuh, kebalikan dari hal yang diungkapkan sebelumnya, ada pula sifat-sifat bahasa yang dipunyai oleh bahasa lain, sehingga ada sifat universal, ada pula yang hampir universal. Hal ini misalnya kita lihat ada sifat universal, ada pula yang hampir universal. Hal ini misalnya kita melihat dalam bahasa Indonesia. Salah satu ciri bahasa Indonesia ialah bahwa konfiks *ke-an* hanya dapat bergabung dengan sebanyak-banyaknya dua bentuk, seperti

tidak pasti

salah paham menjadi

boleh jadi

Ketidak pastian

Kesalah pahaman

Keboleh jadian

dan sebagainya. Ini mungkin sifat unik dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai sifat agak univeral, misalnya bahwa pada umumnya adjektiva mengikuti nomina, seperti *rumah murah*, *jalan besar*, dan *orang pandai*. Ternyata sifat ini tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia, tetapi juga ada dalam bahasa Prancis, bahasa Tonkawa di Amerika, bahasa Swahili di Afrika, dan sebagainya.

Kedelapan, bahasa mempunyai variasi-variasi karena bahasa itu dipakai oleh kelompok manusia untuk bekerja sama dalam berkomunikasi, dan karena kelompok manusia itu banyak ragamnya terdiri dari laki-laki, perempuan, tua, muda; ada orang tani, ada orang kota; ada yang bersekolah, ada yang tidak bersekolah; pendeknya yang berinteraksi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan yang mempergunakan bahasa untuk berbagai keperluan. Setiap manusia mempunyai kepribadian sendiri, dan hal ini yang paling nyata terdijelaskan dalam hal bahasa. Walaupun suatu kelompok sosial mempunyai satu bahasa dan para kelompok itu tidak akan dapat bekerja sama tanpa bahasa – bahkan kelompok sosial itu takkan terwujud tanpa bahasa – keseragaman tidak akan kita temui dalam bahasa. Tiap orang, secara sadar atau tidak mengungkapkan ciri khas pribadinya dalam bahasa sehingga bahasa setiap orang pun mempunyai ciri khas yang sama sekali tidak sama dengan bahasa orang lain. Kita katakan, tiap orang mempunyai *idiolek*. Ferdinand de Saussure (1857 – 1913), sarjana Swiss, Bapak Linguistik modern, membedakan sistem bahasa yang ada dalam akal budi pemakai bahasa dalam kelompok sosial, yang disebut *Langue*, dan manifestasi dan realisasi yang nyata dalam tiap pemakai bahasa, yang disebut *Parole*. Variasi bahasa itu merupakan cermin dari *Parole*.

Kesembilan, dengan bahasa kelompok sosial juga mengidentifikasi dirinya. Diantara semua ciri budaya, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Bagi kelompok-kelompok sosial tertentu, bahasa tidak sekedar merupakan sistem tanda, melainkan sebagai lambang identitas sosial. Apa yang kita sebut bahasa Cina, misalnya, sebenarnya adalah lambang sosial yang ditandai oleh satu sistem tulisan yang mengikat jutaan manusia yang terdiri dari bergai suku bangsa dengan berbagai bahasa yang cukup jauh perbedaannya. Sebaliknya, dipandang dari sudut tata bunyi dan tata bahasa, bahasa Hindi dan bahasa Urdu sebenarnya merupakan satu bahasa, tetapi oleh pemakainya dianggap dua bahasa dan menandai dua kelompok yang berbeda. Kenyataan bahwa bahasa adalah lambang sosial hanyalah mengukuhkan apa yang telah lama, entah selama berapa abad, dikenal orang Melayu dengan pepatahnya, “bahasa menunjukkan bangsa”.

Kesepuluh, karena digunakan manusia yang masing-masing mempunyai cirinya sendiri untuk berbagai keperluan, bahasa mempunyai fungsi. Fungsi bergantung pada faktor-faktor siapa, apa, kepada siapa, tentang siapa, dimana, bilamana, berapa lama, untuk apa, dan dengan apa bahasa itu dianjurkan.

Identitas Budaya

Isu identitas dan subyektivitas telah menjadi tema utama dalam studi kebudayaan di Barat selama dekada 1990-an, terutama oleh kalangan “rezim tentang diri” (regime of the self). Secara konseptual subyektivitas dan identitas mempunyai hubungan yang erat dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Chris Barker kemudian menegaskan, identitas sepenuhnya merupakan suatu konstruksi sosial budaya. Tidak ada identitas yang dapat ‘mengada’ (exist) di luar representasi atau akulturasi budaya

(Barker, 2005:170-171). Pandangan salah satu teoritis *cultural studies* ini menyatakan bahwa identitas dan subjek sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Subyektifitas adalah menyangkut diri (identitas pribadi) seseorang, di dalamnya tercakup perasaan, emosi, hasrat dan kemauan seseorang. Subyektifitas juga berkaitan dengan kesadaran (conscious) dan ketidaksadaran (unconscious) seseorang. Identitas inilah kemudian menjadi rentan terhadap setiap perubahan yang terjadi disekitarnya, seperti adanya dominasi, minoritas, maupun adanya hegemoni dari penguasa yang menyebabkan identitas mengalami perubahan. Sementara mengeksplorasi tentang identitas adalah menanyakan: bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita? (Barker, 2000:165). Pertanyaan tersebut secara umum membagi identitas menjadi dua kategori utama, yakni pertama: identitas kultural dan identitas politik. Identitas kultural menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of belonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness) (Barker, 2005: 169-190), mengidentifikasi tiga perbedaan cara yang mengkonseptualisasikan identitas kultural, yaitu (a) subyek pencerahan; (b) subyek sosiologi, dan (c) subyek posmodernisme. Dalam perspektif era pencerahan berkembang gagasan bahwa pribadi dipandang sebagai agen kesatuan yang unik dan bersekutu terhadap Pencerahan (Enlightenment). Hall juga menganjurkan bahwa untuk memahami konsep identitas kebudayaan juga erat kaitannya dengan asumsi-asumsi yang berkembang dalam aliran pemikiran esensialisme dan anti-esensialisme kebudayaan. Dalam buku *Identity, Community, Culture, Difference*, Stuart Hall berpendapat bahwa identitas budaya bukanlah sesuatu yang jelas dan tanpa masalah karena identitas budaya adalah suatu produk yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses pembentukan dan terbentuk dalam suatu representasi. Representasi ini harus berada dalam proses yang terus menerus dan bersifat personal dan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hall mengatakan bahwa ada dua cara untuk memikirkan tentang identitas budaya. Pertama, dengan memposisikan identitas budaya dalam satu budaya yang sama, secara kolektif dengan menyembunyikan hal lain secara paksa dengan orang-orang yang mempunyai sejarah dan keturunan yang sama. Konsep Stuart Hall (dalam Erniwati, 2011:21-22) juga menegaskan bahwa identitas kultural berhubungan dengan persamaan budaya pada suatu kelompok tertentu dimana anggota-anggotanya memiliki sejarah dan nenek moyang yang sama. Identitas kultural pada definisi ini, menggambarkan persamaan pengalaman sejarah dan berbagai lambang-lambang budaya yang membuat mereka menjadi satu komunitas yang stabil, tidak berubah dan melanjutkan kerangka acuan dan pemaknaan dibawah perubahan sejarah. Identitas budaya di sini memaksakan orang-orang tersebut sebagai one people yang stabil dan tidak berubah. Identitas di sini adalah identitas yang bersifat esensial. Senada dengan Stuart Hall, Kathryn Woodward menjelaskan bahwa identitas yang bersifat esensial suggests that there is one clear, authentic set of characteristics which all shared and which do not alter across time (Woodward, 1997:11). Dengan demikian identitas esensial dapat dipahami sebagai suatu identitas yang mempunyai satu karakteristik yang sama seperti sejarah dalam satu budaya. Dalam pandangan kaum esensialis, bahwa pribadi-pribadi mempunyai hakekat tentang diri yang disebut identitas, untuk itu kajian postkolonial dari kaum esensialis dalam rangka merumuskan identitas “cenderung” menggunakan argumentasi yang bersifat terposisi pada dua kutub atau posisi biner. Oposisi biner yaitu sistem yang

membagi dunia dalam dua kategori yang berhubungan. Model berpikir oposisi biner menempatkan kedudukan Barat, penjajah, self, pengamat, subyek dan menceritakan dianggap memiliki posisi unggul dibandingkan dengan Timur, terjajah, orang luar, obyek, yang diceritakan dan seterusnya. Seperti yang diungkapkan oleh Leela Gandhi (2001:26) bahwa hubungan antara penjajah-terjajah (atau bekas jajahan) adalah hubungan yang hegemoni, penjajahan sebagai kelompok superior dibandingkan pihak terjajah yang inferior. Hubungan antara penjajah-terjajah yang bersifat hegemoni tersebut, kemudian memunculkan apa yang disebut dominasi dan subordinasi. Pola hubungan seperti demikian kemudian memunculkan lagi gambaran-gambaran yang tidak menyenangkan mengenai pihak terjajah sebagai kelompok masyarakat barbar, tidak beradab, bodoh, aneh, mistis dan tidak rasional (Gandhi,2001:vi), atau dalam bahasa Said, Timur diproduksi secara karakteristik dalam wacana para Orientalis sebagai voiceless, sensual, female, despotic, irrational and backward (Said dalam Moore-Gilbert, 1997:39). Said meyakini bahwa selama masa kolonialisme proses produksi pengetahuan berlangsung terus menerus meskipun seorang Orientalis tetap berusaha mempertahankan citra Timur. Kaum esensialisme berasumsi bahwa deskripsi diri mencerminkan hakekat yang didasari identitas. Dengan demikian akan bisa ditetapkan apa itu hakekat femininitas, maskulinitas, orang Asia, remaja dan semua kategori sosial yang lain. Asumsi ini meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pondasi bagi tingkah laku budaya. Pandangan ini menyatakan sistem dan norma itu adalah sesuatu yang sudah baku, tidak bisa diubah, sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusialah yang dianggap menyimpang dari sistem nilai dan norma yang berlaku. Kedua, definisi identitas kultural adalah identifikasi yang dibentuk oleh sejarah dan unsur-unsur kebudayaan. Sebaliknya, terdapat pula pandangan bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Ini merupakan pandangan kaum anti-esensialisme yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. Identitas adalah konstruksi-konstruksi yang tidak saling berkaitan, makna-maknanya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu, serta penggunaannya. Definisi kedua ini memosisikan identitas budaya dengan mengakui adanya persamaan dan perbedaan. Identitas yang bersifat non-esensialis ini fokus kepada perbedaan dan juga persamaan karakteristik. Dalam pengertian yang kedua ini, Hall (1990) juga mengatakan bahwa identitas budaya adalah persoalan tentang bagaimana seorang membentuk dirinya. Identitas budaya masuk ke dalam dunia masa depan sekaligus dunia masa lalu.

Identitas budaya sangat bergantung kepada bagaimana seseorang menjadikan identitas budaya itu sebuah posisi dan bukan esensi, sehingga orang itu dapat menjadi “siapa saja” dimana pun ia berada. Stuart Hall menjelaskan mengenai identitas budaya yang masalah identifikasinya bersifat tidak tetap. Identitas adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti pembentukannya, bukan hanya sesuatu yang ‘ada’, namun sesuatu yang terus ‘menjadi’. Lebih lanjut Hall (1993) menunjukkan posisinya dalam pengertian identitas sebagai sesuatu yang cair dan mengalami pembentukan, Hall menegaskan

bahwa identitas bukan sesuatu yang kaku dengan karakteristik tetap yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Identitas adalah sesuatu yang terus-menerus dibentuk dalam kerangka sejarah dan budaya, sesuatu yang diposisikan pada suatu tempat dan waktu, sesuai dengan konteks. Pencarian identitas seseorang selalu terkait dengan permasalahan bagaimana orang itu berusaha menempatkan dirinya (positioning) dalam suatu lingkup masyarakat yang telah menempatkan dirinya dalam lingkup lain (being positioned).

Hal ini juga berkaitan erat dengan persamaan dan perbedaan dalam identitas budaya. Perbedaan dan persamaan inilah ada dalam cakupan identitas budaya. Identitas juga dipaparkan oleh Hall sebagai suatu hal yang selalu berubah dan tidak pernah tetap. Oleh karena itu, seseorang dapat mengalami perubahan identitas seiring dengan kehidupannya. Identitas kultural disini kemudian mengandung identitas politik, yaitu politik penentuan posisi dalam masyarakat tertentu. Secara implisit, dalam Sutrisno dkk. ed, 2004:145-146) juga berpendapat bahwa identitas kultural bukanlah identitas bawaan yang dibawa sejak lahir dari kekosongan. Identitas kultural bukanlah entitas yang sudah ditakdirkan. Pandangan tentang oposisi biner “penjajah” dan “terjajah” tidak lagi sebagai yang terpisah satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri. Sebaliknya, pendapat Bhaba menganjurkan bahwa negosiasi identitas kultural mencakup perjumpaan dan pertukaran tampilan budaya yang terus menerus yang pada saatnya akan menghasilkan pengakuan timbal balik akan perbedaan budaya.

Postkolonial

Teori postkolonial (Martono, 2014:101-132) dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreofisasi bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Makaryk dalam Faruk (2007:14) mendefinisikan postkolonial sebagai kumpulan strategi teoretis dan kritis yang memiliki asumsi untuk mempersoalkan posisi subjek kolonial dan pasca kolonial. Hampir sama dengan Makaryk, Ratna (2008:90) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan postkolonialisme adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti: sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya, yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Dengan perkataan lain, postkolonial sebagai alat atau perangkat kritik yang melihat bagaimana sendi-sendi budaya, sosial dan ekonomi yang didalamnya terdapat subjek pascakolonial.

Ratna (2008: 77-78), Budiawan (2010:vi-ix) dan Martono (2014:102-104) secara khusus membedakan istilah dan pengertian antara pascakolonial dengan postkolonial. Baik Ratna, Budiawan dan Martono nampaknya sepakat bahwa pascakolonial berkaitan dengan era, zaman, dan periode yang memiliki batasan pasti, yakni masa pasca-kolonial. Sedangkan sebagai teori, postkolonial merupakan sebuah tradisi intelektual dengan batasan-batasan yang bersifat relatif.

Istilah postkolonial adakalanya ditulis dengan menggunakan tanda hubung setelah awalan ‘pos’nya, untuk menekankan perbedaan studi postkolonial dengan teori wacana kolonial yang hanya berlaku sebagai salah satu aspek pendekatan dari berbagai pendekatan dan keterkaitan yang seharusnya mewarnai wacana postkolonial (Aschroft 1998:87). Dalam hal ini, postkolonialisme adalah kritik terhadap ideologi (ide atau

gagasan) kolonialisme; mengkritik bentuk totalisasi, dominasi dan bentuk kepemimpinan budaya (hegemoni) Barat. Sebagai ideologi yang mengkritik dominasi budaya Barat, postkolonialisme merupakan bentuk pemikiran baru tentang diferensi budaya. Postkolonialisme menentang universalisme nilai-nilai budaya Barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme dan materialisme. Apa yang bagi Barat merupakan universalisme, namun bagi masyarakat Timur merupakan imperialisme. Berkaitan dengan hal itu, Barat sedang dan akan terus berusaha mempertahankan superioritas serta kepentingan-kepentingannya dengan cara menunjukkan kepentingan-kepentingan itu seakan-akan sebagai kepentingan “masyarakat dunia” atau global (Huntington 2001:334-335).

Definisi postkolonialisme lebih berguna tidak pada saat ia bersinonim dengan periode historis setelah kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan, tetapi pada waktu dialokasikan sebagai anti atau kritik terhadap pembajakan dan penindasan budaya oleh pihak kolonialis. Dengan demikian, kolonialisme dan imperialisme dalam pengertian ini dapat diartikan sejak dimulainya kekuasaan kolonial memasukkan dirinya dalam ruang budaya bangsa lain sampai sekarang. Istilah postkolonial difokuskan pada produksi budaya masyarakat yang mengalami imperialisme Eropa, dan dipergunakan secara luas dalam bidang sejarah, politik, sosiologi, komunikasi dan analisis ekonomi, karena berbagai bidang tersebut juga dipengaruhi oleh imperialisme. Imperialisme inilah yang tampaknya tetap hidup di tempat ia hidup sebelumnya, dalam semacam lingkaran budaya umum maupun dalam praktek-praktek politik, ideologi, ekonomi, serta sosial tertentu (Said 1995:40). Imperialisme bentuk baru tersebut ditandai oleh peniruan model budaya Barat dan konsumsi produk Barat yang dominan. Bahkan oleh penganut Marx, pengaruh Barat yang berkelanjutan dan dialokasikan dalam kombinasi fleksibel bidang ekonomi, politik, militer dan ideologi (tetapi lebih cenderung untuk kepentingan ekonomi) masih dinamakan sebagai kolonialisme, yaitu kolonialisme baru, sementara prosesnya yang disebut sebagai imperialisme baru (Williams 1993:3). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa postkolonialisme adalah perlawanan sehari-hari, sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson (1999:8-9) bahwa sebetulnya mode atau siasat perlawanan massa rakyat kecil tanpa politik yang dilakukan dengan gerakan “picisan” untuk mengkaji ulang “politik modern” identitas adiluhung kalangan elite yang (sedang) berkuasa. Siasat tersebut oleh Lubis (2006:201) dapat merubah masyarakat dari yang cenderung terposisi pada “dua kutub”, dengan identitas tunggal dan komunal menjadi masyarakat yang saling berintegrasi dan bergesekan antar masyarakat yang bersifat lokal dan global secara bersamaan.

Pembicaraan tentang postkolonialisme tidak terbatas pada upaya mencari kemerdekaan sebuah negara tetapi sudah lebih luas. Postkolonial atau pascakolonial, menurut Loomba (2005:15) dapat dipikirkan sebagai suatu perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisan-warisan kolonialisme. Jorge de Alva-seperti dikutip Loomba (2003: 16) melihat pascakolonial sebagai suatu subjektivitas dari perlawanan terhadap wacana-wacana dan praktik-praktik imperialisme atau kolonialisasi. Postkolonialisme juga tidak hanya terbatas pada upaya perlawanan terhadap pencarian kemerdekaan sebuah negara maupun perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisan-warisan. Oleh karena itu pascakolonialisme tidak dapat dimaknai pada sebuah konsep yang tunggal dan statis (Moore-Gilbert dalam Faruk,2007:5). Selain itu pula analisis wacana kolonial dan teori postkolonial ini disimpulkan William sebagai kritik mengenai proses produksi pengetahuan tentang the Other (Williams dan

Chrisman, 1994:8). Dalam hal ini budaya berperan sebagai elemen resisten, karena kenyataannya budaya merupakan manifestasi yang bersifat ideologis atau idealis, dari realitas sejarah dan fisik masyarakat (bangsa) yang mengalami dominasi (Cabral 1979:73). Pada budaya terdapat sintesis yang dinamis, yang dibuat dan dibangun oleh kesadaran sosial untuk menyelesaikan konflik pada setiap tahapan evolusi, yaitu konflik yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh faktor eksternal yaitu dominasi dan tekanan dari budaya penjajah, untuk bertahan hidup serta mencari kemajuan. Dalam budaya terletak kapasitas (tanggung-jawab) untuk membentuk dan menjamin kelanjutan sejarah, dan pada saat yang bersamaan juga memastikan atau menentukan prospek evolusi dan kemajuan sebuah masyarakat (bangsa). Maka dapatlah dimengerti bahwa untuk menjamin kontinuitas praktek kolonialisme, kaum imperialis perlu untuk menekan atau memandekkan perkembangan budaya pribumi (tradisional), agar bisa terus didominasi oleh budaya penjajah. Studi tentang perjuangan kemerdekaan menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan kerap didahului oleh peningkatan pengekspresian budaya pribumi untuk menegaskan atau menguatkan kepribadian budaya bangsa terjajah, sebagai alat untuk meniadakan hegemoni budaya penjajah. Hal inilah yang menjadi kritik pemikiran postkolonial tentang representasi identitas, yaitu untuk mengedepankan atau memulihkan kembali budaya yang tertindas tersebut sebagai identitas yang sesungguhnya dari bangsa yang pernah dipengaruhi oleh proses imperial. Dalam kaitannya dengan keilmuan komunikasi Homi K. Bhabha membuktikan bahwa sebagai tanda, model kolonialisme selalu bersifat ambigu, polisemik. Karena itu konstruksi kolonial mengenai dirinya maupun mengenai timur dapat memperoleh pemaknaan yang bermacam-macam dan bertentangan. Said (1995:12) mengatakan disamping suatu praktik, kebudayaan adalah komunikasi dan representasi, bahkan memiliki nilai estetis. Oleh karena itu sejalan dengan pemikiran tentang diferensi budaya tersebut, postkolonialisme menolak pandangan monosentris terhadap pengalaman manusia, dan sebaliknya mengakui dan menghargai keberadaan pluralisme serta multikulturalisme budaya melalui sinkretisasi dan hibriditas (Mishra 1993:41). Pluralisme kemudian didefinisikan sebagai suatu keyakinan, dimana di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok politis, ideologis, kultural atau etnis, tidak ada satu kelompok pun yang dominan, yang di dalamnya terdapat penghargaan akan diferensi. Dalam pluralisme budaya tersebut, diakui adanya keyakinan akan hak hidup dan ruang ekspresi yang sama dan sejajar bagi setiap kelompok budaya yang ada didalamnya. Sementara Multikulturalisme adalah gerakan bagi pengakuan dan penerimaan akan keanekaragaman, perbedaan, dan identitas, khususnya dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai kelompok minoritas, akan tetapi dikuasai oleh kelompok kultural dominan (Piliang 2001:16).

SIMPULAN

Bahasa secara umum dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi.

Begitu juga dengan budaya tidak terlepas dari bahasa yang kita gunakan dalam masyarakat Indonesia karena budaya merupakan identitas dalam postkolonial dalam masyarakat Indonesia. Bahasa merupakan sebuah sistem, yang artinya, bahasa dibentuk

oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Definisi sederhana postkolonial adalah sebagai masa setelah kolonialisme. Tetapi pengertian postkolonial itu dapat ditinjau dari sisi lain daripada sekedar tahapan periode sejarah atau dari segi waktu, yaitu dari sisi orientasi ideologis. Jadi bahasa berkaitan erat dengan identitas budaya postkolonial masyarakat Indonesia. Karena identitas budaya adalah suatu produk yang tidak pernah selesai, selalu dalam proses pembentukan dan terbentuk dalam suatu representasi. Representasi ini harus berada dalam proses yang terus menerus dan bersifat personal dan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari

Identitas juga dipaparkan oleh Hall sebagai suatu hal yang selalu berubah dan tidak pernah tetap. Oleh karena itu, seseorang dapat mengalami perubahan identitas seiring dengan kehidupannya. Identitas kultural disini kemudian mengandung identitas politik, yaitu politik penentuan posisi dalam masyarakat tertentu. Secara implisit, dalam Sutrisno dkk. ed, 2004:145-146) juga berpendapat bahwa identitas kultural bukanlah identitas bawaan yang dibawa sejak lahir dari kekosongan. Identitas kultural bukanlah entitas yang sudah ditakdirkan. Pandangan tentang oposisi biner “penjajah” dan “terjajah” tidak lagi sebagai yang terpisah satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri. Sebaliknya, pendapat Bhaba menganjurkan bahwa negosiasi identitas kultural mencakup perjumpaan dan pertukaran tampilan budaya yang terus menerus yang pada saatnya akan menghasilkan pengakuan timbal balik akan perbedaan budaya. Postkolonialisme merupakan bentuk pemikiran baru tentang diferensi budaya. Postkolonialisme menentang universalisme nilai-nilai budaya Barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme dan materialisme. Apa yang bagi Barat merupakan universalisme, namun bagi masyarakat Timur merupakan imperialisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hassan (ed.) 1978. *Rencana Linguistik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Anderson, Benedict. 1999. *Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme* (terj). Yogyakarta. Pustaka Pelajar-Insist.
- Aschort, B., et.al. 1998. *Key Concepts in Postcolonial Studies*. London: Routledge.
- Barker, Chris. 2000, *Cultural Studies, Theory and Practice*. London: Sage Publications Ltd.
- _____. 2005. *Cultural Studies* (terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- _____. 2013. *Cultural Studies* (terj). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Budiawan (ed). 2010. *Ambivalensi: Post-Kolonialisme Membedah Musik Sampai Agama di Indoensia*. Yogyakarta. Jalasutra.
- Darmawan, Darwin. 2014. *Identitas Hybrid Orang Cina*. Yogyakarta. Gading Publishing.
- Erniwati. 2011. *China Padang dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau: dari Revolusi Sampai Reformasi*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Faruk. 2007. *Belunggu Pasca-Kolonial, Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Kusno, Abidin. 2000. *Behind the Postcolonial: Architecture, urban space and colonial culture in Indonesia*, London-New York: Routledge.
- Harimurti Kridalaksana. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa Ende: Nusa Indah*.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2008. *Postkolonialisme Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Bandung. Mizan.
- Samsuri. 1972. *Bahasa dan Ilmu Bahasa*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Sianipar, Gading. 2004. *Mendefinisikan Pascakolonialisme dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto* (eds). *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sutrisno, Mudji; Hendar Putranto. 2004. *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*. Yogyakarta. Kanisius.

